

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Asy-Syarbashi, Yas'alunaka, *Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, terj.

Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 1997.

Ani Sri Rahayu, S.IP., M.AP., *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2018.

Bagir manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co,

1992.

Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: 1993.

Bagir Manan, *Teori Polttik dan Konstitusi*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi

Depdiknas, 2000.

C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Bina

Aksara, 1984.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:

Balai Pustaka, Edisi III, 2002.

Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan Cara Mencegah*

Kecanduannya, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: PT. Kanisus,

2007, Anggota IKAPI.

Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, Malang: UB Press, 2001.

Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung:

Nusamedia, 2011.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*

Bandung: Mandar Madju, 1998.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Cet. VI.

Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum, dan Kriminologi*,

Bandung: Remaja Karya, 1984.

Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta:

Liberty, 1990.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Hukum Penelitian*. Universitas Indonesia: 2008.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali

Pers: 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

2014.

Supardan Modeong, SH., *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-*

Undangan Tingkat Daerah, Jakarta : PT. Tintamas Indonesia, 2001.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar

Lampung: Unila, 2009.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Van Der Tak dalam Syamsudin, Aziz. *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*,

Jakarta: Sinar Garfika, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika-Narkoba Tahun 2002 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

C. Jurnal dan Skripsi

Adventus Toding, *Pembelajaran Hukum Melalui Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi

Herdiansyah Hamzah, *Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal

Irfan, *Efektifitas Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Mengenai Larangan Mengemis, Mengamen, Dan Pedagang Asongan Di Wilayah Cengkareng*

Jakarta Barat (Analisa Terhadap Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Esa Unggul.

Luffita Alfianti, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi*

Minuman Beralkohol Tradisional, Jurnal.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan*

Perundang-undangan Di Indonesia, Jurnal

Ni'matul Huda, "*Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan*

Perundang-undangan", Jurnal Hukum

Ruben Arnaldo Purba, "*Analisa Pelaksanaan PERDA Kota Tangerang Nomor 7*

Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman

Beralkohol, Serta Dampaknya Bagi Peningkatann Ketertiban Umum Di

Wilayah Kota Tangerang. Esa Unggul.

D. Internet

www.kbbi.web.id/warung.html , Diakses pada tanggal 31 Maret 2020

Kompasiana.com, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia,

[https://www.kompasiana.com/desijayanti/5964c53902b52f200c29eb13/tata-](https://www.kompasiana.com/desijayanti/5964c53902b52f200c29eb13/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia?page=all#sectionall)

[urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia?page=all#sectionall](https://www.kompasiana.com/desijayanti/5964c53902b52f200c29eb13/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia?page=all#sectionall),

diakses pada tanggal 12 Desember 2019

<http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>, diakses

pada tanggal 20 Juni 2020

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/02/28/pemkot-tangerang->

[musnahkan-sebanyak-12475-botol-miras](#), Diakses pada tanggal 16 September

2019

E. Wawancara

H. Alwani, Binmas, Wawancara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Titto C, Kassubag Bantuan Hukum, Wawancara, Pemerintahan Kota Tangerang

Iptu. Irwan Kusuma, Kasat Reskrim, Wawancara, Polsek Ciledug Kota Tangerang